FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Skripsi

Oleh
RIYADHI ADYAN SYAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRACT

FACTORS CAUSE NOT ACHIEVE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

By
Riyadhi Adyan Syah

Number of Taxpayers in the city of Bandar Lampung according to data obtained was 550,000, based on data taxpayer who does not pay an amount of 415.387. Over the last 4 years the land and building tax reception at the Regional Revenue Office Bandar Lampung has not reached the targets set, therefore researchers interested in conducting research on the factors that lead to failure to achieve acceptance of the land and building tax in Bandar Lampung.

The purpose of this study was to analyze and describe the factors that cause failure to achieve acceptance of Land and Building Tax in Bandar Lampung, so classified in the study using a qualitative approach. The research sample consisted of three sub-district were registered in the city of Bandar Lampung-year period 2012-2015. The data used in this study are primary and secondary data and selection of samples using methods perposive sampeling.

The results showed that the factors that hinder the achievement of not increasing acceptance of the in the city of Bandar Lampung, among others due to resource management fiskus has not been good as a result of the lack of information about the importance of taxes for local development and the lack of data collection on a regular basis in each district. As well as their non-compliance Payer Land and Building Tax (PBB) shown is not exactly the time to pay taxes and No notice of WP when moving location. While the factors that can support the achievement of the strategy of increasing acceptance of the in the city of Bandar Lampung, among others their commitment to good human resources, social conditions which favor one implementation of regulations regarding the change of the balance funds into Local Tax. social conditions that have a high level of awareness in paying taxes to support the increasing acceptance of the in the city of Bandar Lampung.

Keywords: tax authorities, taxpayers, the Reception

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Riyadhi Adyan Syah

Jumlah Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung menurut data yang diperoleh adalah 550.000, berdasarkan data Wajib Pajak yang tidak membayar sebesar 415,387. Selama 4 tahun terakhir penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung belum mencapai target yang telah ditetapkan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung, sehingga tergolong pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari 3 kecamatan yang terdaftar di Kota Bandar Lampung periode tahun 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *perposive sampeling.*

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung antara lain karena manajemen sumber daya fiskus PBB yang belum baik akibat dari kurangnya penyuluhan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan kurangnya Pendataan ulang secara berkala di setiap kecamatan. Serta adanya ketidak patuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan tidak tepatnya waktu dalam membayar pajak dan tidak ada pemberitahuan dari WP apabila pindah lokasi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung antara lain adanya komitmen sumberdaya manusia yang baik, kondisi sosial masyarakat yang mendukung salah satunya implementasi peraturan mengenai perubahan PBB dari dana perimbangan menjadi pajak daerah. kondisi sosial masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi dalam membayar pajak dapat mendukung peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Fiskus, Wajib Pajak, Penerimaan PBB

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung

Oleh

Riyadhi Adyan Syah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Riyadhi Adyan Syah*

No. Pokok Mahasiswa : **1116021094**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP 19621127 198902 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

   Penguji : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : **22 Februari 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila, dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam peryataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2016

METERAI TEMPEL
3C5CAADF316989640
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Riyadhi Adyan Syah
NPM. 1116021094

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama RIYADHI ADYAN SYAH, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 07 Januari 1993, sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin Yahya SE dan Ibu Yanti Usman SE

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-Kanak Telkom Sandi Putra yang diselesaikan pada tahun 1999, menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2005, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2008, dan pendidikan menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri (UM)

Motto

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Al-Baqarah:153)

"keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat"
(Winston Chuchill)

"Jadilah seperti ikan di laut, dari telur hingga menjadi ikan besar hidup di air asin. Akan tetapi daging dalam ikan itu tidak juga ikut terasa asin"
(Ayah)

"Berangkat dengan penuh keyakinan
Berjalan dengan penuh keikhlasan dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan"
(Riyadhi Adyan Syah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam

Untuk setiap Nikmat dan Karunia-Nya yang mengalir dalam hidupku ini.

Karena Ridho-Mu dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan karya ini untuk

Kedua orang tuaku Nurdin Yahya SE dan Yanti Usman SE.yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan memperjuangkan diriku menghadapi dunia ini dengan ketulusan hati telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya, kesabaran dalam membimbing, serta telah mengajarkan banyak hal tentang hidup dengan tetesan keringat yang tidak dapat kubalas dengan apapun. Serta keikhlasan doa untuk mendidik dan member dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang, sehingga aku bias menyelesaikan skripsi ini semata-mata untuk membanggakan kalian,

Kakakku Nur Aty Aini S.T dan Adikku Akbar Tri Mahendra, Syakira Azka Sabilla tersayang yang selalu mendo'akan, mendukung dan menyemangatiku dalam menggapai keberhasilanku

Seluruh sahabat kutersayang, yang sudah menjadi keluarga untukku serta selalu menemani dan menjadikan berwarna hari-hari di sepanjang hidup ini.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayat-Nya proses yang dijalani dalam pembuatan skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandar Lampung"* dapat berjalan dengan baik. Selesainya skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung .
2. Bapak Drs.Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan didikkan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan
4. Ibu Dwi Wahyu Handayani S.IP,M.Si, selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, solusi dan motivasi selama penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dermawan Purba S.IP, M.IP , selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan memberikan motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan;
7. Staf akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, *Mba* Iin dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Riyanti, Pak Jumadi dan Pak Herman yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi dan perlengkapan seminar serta ujian;
8. Kedua orang-tuaku dan kakakku serta keluargaku yang telah mendoakan, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan. Aku selalu bersyukur memiliki keluarga seperti kalian dan ku tahu bahwa apapun dan berapapun yang akan kuberikan nanti, tidak akan pernah bisa cukup, lebih, dan terbalaskan, jika dibandingkan dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku dari dalam kandungan sampai kini dan nanti, *family are thebest thing i've ever had*;

9. Jajaran Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung (DISPENDA), KPP Pratama Bandar Lampung, Camat Kedamaian , Langkpura dan Tanjung Karang Timur serta jajaranya dan Masyarakat Bandar Lampung yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian;
10. Sahabat putih abu-abuku, Mia Nasya Tamara SH, Dyan Ayu yaritha , Sartika Aprilia , Haryani Irbah, Faidzin Khadafi, Septias Herson. terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis selama ini, kita harus sering main bareng ya walaupun sulit bagi waktu karena kebersamaan itulah yang akan mempererat persahabatan kita;
11. Sahabat tersayang yang sudah seperti saudara di Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila,yaitu Dian Seputri S.IP, Al Derajat S.IP, Rizky Tri Saputra S.IP , Achmad Tri Johan, Azwin Mahmud, Angga Alamsyah, Yuyun Diah A S.IP, Meyliza Indriyani P S.IP, Nadia Anissa M S.IP, Zakiyah Handayani S.IP, dan Feby Puspitasari S.IP, Pertiwi Agustina S.IP, Miranti Andini S.IP,akhirnya kita sarjana ya kawan, terima kasih atas kebersamaan dalam melewati tahap demi tahap perkuliahan, senang maupun susah yang telah kita lewati bersama akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan oleh penulis;
12. Teman sepermainan dan kerabat skripsi, Pertiwi Agustina, Genta Rizkyansah, Winda Septiana, Indra Rinaldi, Adelia Pramadita, Santi Novitasari,dan Miranti Andini;
13. Teman-teman seperjuanganku, Leni Novelina, Panggih, Shedy, Nugraha, Merari, Aan Lesmana, A.T Johan, Christian, Dwiky, Nando, Redo, Randi, Yandi, Marendra, Restia, Natessya, Balkis, Bertha, Leni Yuliani, Wirda, Putri

Dian, Gita, Kiki, Hazi, Rendra, Siti, Wiwik, Wilanda, Endah, Randi, Intan, Diki dll yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

14. Serta seluruh mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan canda dan tawa selama perkuliahan;
15. Yang selalu memberi motivasi yang selalu support gimanapun keadaan dan setia nemenin proses Skripsi berjalan Fitri Soraya Diharani S.AB
16. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL..... iii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Kegunaan Penelitian..... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Secara Umum 11
B. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan 16
C. Hak dan Kewajiban Fiskus..... 17
D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 19
E. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 20
F. SPOP dan SPPT 21
G. Penetapan Tarif PBB 23
H. Cara Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan..... 23
I. Kerangka Pikir..... 24

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian..... 26
B. Informan Penelitian..... 27
C. Subjek Penelitian..... 28
D. Fokus Penelitian 29
E. Waktu dan Tempat Penelitian 30
F. Jenis data 30
G. Teknik Pengumpulan Data 31
H. Teknik Pengolahan Data 33
I. Teknik Analisis Data 34
J. Teknik Keabsahan Data..... 36

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 41
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pemerintah Kota

Bandar Lampung 46
C. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 53

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Peneliitan 61
B. Pembahasan 84

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 89
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.2. Data realisasi Wajib Pajak kecamatan/kelurahan di Kota Bandar Lampung.....4

3.1 Daftar Kecamatan di Bandar Lampung yang menjadi sampel penelitian 29

5.1 Data realisasi PBB dari 3 kecamatan yang menjadi sampel 78

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang digalakan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor *public* berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dengan di tujukan dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengolahan.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jendral Pajak dan unit oprasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan (KPPBB). PBB adalah pajak langsung sehingga pemungutannya langsung kepada Wajib Pajak selanjutnya disingkat WP dan saat terutangnya pada saat awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga objek pajak berupa pajak tanah atau bangunan menentukan besar kecilnya pajak terutang (Budiono,1997).

Pelaksanaan PBB saat ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, sebagai pengganti Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB. Disamping Undang-Undang tersebut untuk mengatur pembagian hasil PBB, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu PBB yang masuk dalam kategori Pajak Negara harus terus digali dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang semua orang memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB yang sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang tentang pentingnya pajak, sampai pada metode pemungutan yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Sejak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/PMK07/2010, Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Manfaat menurut Undang-Undang tentang PBB yang menyatakan bahwa hasil dari bumi yang meliputi tanah dan air kemudian hasil dari bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Permasalahanya penerimaan PBB setiap tahun nya tidak mencapai target. Data dari sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung,

target realisasi PBB untuk tahun 2012 sampai 2014 ditetapkan lebih rendah dibanding nilai ketetapan pajak untuk tahun tersebut yaitu sebesar 80% dari ketetapan pajak. Hal ini disebabkan karena selalu adanya WP yang menunggak pembayaran PBB. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012-2014.

Tabel 1.1 Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	Rp 51.500.000.000	Rp 39.082.402.187	24,11%
2	2013	Rp 80.000.000.000	Rp 45.891.610.670	42,64%
3	2014	Rp 84.000.000.000	Rp 46.804.938.319	44,94%
4	Rata-Rata	Rp.71.833.333.333	Rp. 43.926.335.039	37,26%

Sumber: Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung (2015)

Dalam tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama 4 tahun terakhir penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 24,11% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2013 penerimaan PBB mencapai 42,64%, namun pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat kita lihat dari target penerimaannya yang naik sebesar Rp.45.891.610.670. Kenaikan penerimaan PBB terjadi lagi pada tahun 2014 dari tahun sebelumnnya sebesar 44,94%. Namun dalam tahun 2014 kenaikan penerimaan PBB belum juga mencapai target yang telah di tentukan. Rata-rata hasil realisasi PBB dari tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesarRp. 43.926.335.039 atau hanya sebesar 37,26%. Hal ini menunjukan bahwa masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah penerimaan PBB tidak pernah mencapai target terutama pada priode tahu 2012-2014.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti untuk penerimaan PBB per kecamatan/kelurahan terlihat bahwa penerimaan PBB disetiap kecamatan berbeda-beda. Akan tetapi dari semua kecamatan/kelurahan realisasi PBBnya belum juga mencapai target yang ditentukan, dan masih banyak sekali jumlah WP yang melakukan penunggakan pajak. Berikut uraian data per kecamatan/kelurahan:

Bandar Lampung sendiri terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan:

1.2. Data realisasi WP Kecamatan/Kelurahan di Kota Bandar Lampung 2015

No	Kecamatan/kelurahan	Jumlah WP	Jumlah WP yang menunggak
1	**Tanjung Karang Timur**		
	Kota Baru	7.226	5.569
	Tanjung Agung	2.404	1.968
	Kebon Jeruk	3.082	2.437
	Sawah Lama	1.725	1.204
	Sawah Brebes	2.498	1.714
2	**Kedaton**		
	Kedaton	5.324	4.143
	Surabaya	3.808	2.774
	Sukamenanti	1.590	1.080
	Sidodadi	3.732	2.452
	Sukamenanti Baru	1.230	767
	Penegahan	1.074	817
	Penengahan Raya	1.751	1.444
3	**Sukarame**		
	Sukarame	13.082	9.404
	Way Dadi	4.643	3.075
	Sukarame Baru	7.955	5.762
	Waydadi Baru	7.522	5.841
	Korpri Jaya	4.013	3.011
	Korpri Raya	4.935	3.719
4	**Tanjung Karang Barat**		
	Gedong Air	5.193	3.252
	Sukajawa	3.806	2.889
	Susunan Baru	2.155	1.345
	Sukadanaham	5.258	4.681
	Sukajawa Baru	2.520	1.820
	Kelapa Tiga Permai	1.789	1.366
	Segala Mider	8.182	6.774
5	**Panjang**		
	Panjang Selatan	5.208	3.401
	Srengsem	2.771	1.390
	Panjang Utara	5.902	4.265
	Pidada	4.887	3.497

	Karang Maritim	3.207	2.030
	Way Lunik	3.876	3.104
	Ketapang	1.425	1.093
	Ketapang Kuala	1.339	1.096
6	**Tanjung Karang Pusat**		
	Durian Payung	4.268	2.882
	Gotong Royong	2.613	1.958
	Kaliawi Persada	2.088	1.551
	Palapa	2.162	1.481
	Kaliawi	3.844	2.899
	Kelpapa Tiga	5.322	4.291
	Pasir Gintung	2.674	2.093
7	**Teluk Betung Selatan**		
	Pesawahan	7.141	4.832
	Telukbetung	3.226	2.382
	Talang	3.618	2.543
	Gedung Pakuon	2.135	1.661
	Sumur Putri	3.312	2.563
	Gunung Mas	1.109	607
8	**Teluk Betung Barat**		
	Bakung	4.251	4.121
	Kuripan	2.020	1.550
	Negeri Olok Gading	4.690	3.240
	Sukarame II	3.101	2.351
	Batu Putuk	4.893	4.160
9	**Teluk Betung Utara**		
	Kupang Kota	3.294	2.081
	Kupang Raya	1.448	831
	Kupang Teba	5.097	3.435
	Pangajaran	3.681	3.004
	Gulak Galik	3.822	3.119
	Sumur Batu	4.075	3.177
10	**Rajabasa**		
	Rajabasa	3.351	2.906
	Gedong Meneng	5.095	4.343
	Rajabasa Nunyai	6.411	4.781
	Rajabasa Pemuka	5.143	4.097
	Gedong Meneng Baru	1.053	766
	Rajabasa Raya	5.511	4.609
	Rajabasa Jaya	7.146	5.684
11	**Tanjung Seneng**		
	Tanjung Senang	10.921	8.724
	Way Kandis	7.216	5.636
	Labuhan Dalam	5.056	3.596
	Perumnas Way Kandis	3.659	2.596
	Pematang Wangi	6.166	5.048
12	**Sukabumi**		
	Sukabumi	14.613	11.955
	Sukabumi Indah	7.039	5.411
	Campang Raya	5.185	4.198
	Nusantara Permai	3.967	3.054
	Campang Jaya	8.546	7.373

	Way Gubak	3.774	3.125
	Way Laga	5.691	4.907
13	**Kemiling**		
	Sumberejo	4.701	3.484
	Beringin Jaya	5.440	4.069
	Kemiling Permai	10.236	7.921
	Sumber Agung	3.101	2.479
	Kedaung	2.371	2.124
	Pinang Jaya	5.114	4.217
	Sumberejo Sejahtera	6.438	5.120
	Kemiling Raya	4.352	3.418
	Beringin Raya	8.183	6.149
14	**Labuhan Ratu**		
	Labuhan Ratu	5.220	4.165
	Labuhan Ratu Raya	8.946	7.296
	Sepang Jaya	6.179	4.759
	Kota Sepang	2.217	1.640
	Kampung Baru	3.173	2.502
	Kampung Baru Raya	777	500
15	**Way Halim**		
	Perumnas Way Halim	5.809	3.972
	Way Halim Permai	8.269	6.232
	Gunugn Sulah	4.482	2.867
	Jagabaya 1	1.037	760
	Jagabaya II	5.133	3.640
	Jagabaya III	4.151	2.125
16	**Langkapura**		
	Langkapura	4.396	3.371
	Langkapura Baru	3.357	2.384
	Gunung Terang	7.923	6.207
	Gunung Agung	4.295	3.418
	Bilabong Jaya	2.444	1.948
17	**Enggal**		
	Enggal	3.039	2.388
	Pelita	2.094	1.568
	Tanjung Karang	2.581	1.718
	Gunung Sari	2.730	1.704
	Rawa Laut	2.281	2.236
	Pahoman	2.699	2.213
18	**Kedamaian**		
	Kedamaian	5.641	4.272
	Bumi Kedamaian	7.440	5.817
	Tanjung Agung Raya	926	738
	Tanjung Baru	4.548	3.372
	Kalibalau Kencana	5.265	3.685
	Tanjung Raya	4.391	3.755
	Tanjung Gading	2.459	1.798
19	**Teluk Betung Timur**		
	Kota Karang	3.512	2.062
	Kota Karang Raya	2.347	1.485
	Perwata	1.592	854
	Keteguhan	6.389	4.846

	Sukamaju	3.335	2.698
	Way Tataan	898	436
20	**Bumi Waras**		
	Sukaraja	5.597	4.233
	Bumi Waras	5.854	3.755
	Garuntang	2.684	1.840
	Bumi Raya	3.355	2.352
	Kangkung	5.085	4.489

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2015

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan PBB saat ini sedang digalakkan karena pajak ini dialihkan menjadi pajak daerah dan masih banyaknya WP yang masih menunggak di Bandar Lampung. Walikota Bandar Lampung meninjau perencanaan penagihan *door to door* untuk mengoptimalkan hasil PBB seperti kutipan dari berita di bawah ini.

Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, MM pada Rabu tanggal 5 September 2014 menandatangi pencanangan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Aktif Operasi Sisir (*Door To Door*) PBB Tahun 2014 Di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 43 Milyar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Yusran Effendi, SE, MM, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PBB untuk Kota Bandar Lampung telah mencapai Rp. 17,79 Milyar atau sekitar 41,39% dari 13 wilayah kecamatan se-Kota Bandar Lampung. Guna menggenjot penerimaan dari sektor PBB ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk tim terpadu untuk melakukan kegiatan Penagihan Aktif Operasi Sisir (Door To Door) yang akan bekerja dari tanggal 5 hingga 18 September 2014 (http://103.31.249.18/?p=1046, diakses tanggal 28 Septmber 2015 pukul 16.45 WIB)

Hasil penelitian WitiyaTri Handayani (2014) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta menunjukkan bahwa: (A) faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yaitu: (1) SPPT tidak tersampai kepada WP dikarenakan WajibPajak tidak berdomisili pada Objek Pajak, pemilik baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik lama, tanah warisan yang sudah dibagi dan ganti nama dalam sertifikat tetapi nama dalam PBB belum diganti, tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati secara bersama-sama, WP mengontrak atau hanya sementara menempati Objek Pajak, WP tidak dikenal, tanah relokasi, SPPT nama WP *No Name* (NN), tanah kuburan terbit SPPT, dobel SPPT, kesalahan nama WP pada SPPT, alamat objek Pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

(2) WP lupa membayar PBB karena faktor kesibukan, (3) isu Pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar PBB, (6) topografi wilayah, (7) data belum di*entry*, (8) tingkat pendapatan WP. (B) Hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta memiliki persentase yang berbeda-beda antara satu faktor dengan faktor lainnya. (https://www.google.co.id/faktor-faktor+penyebab+tidak+tercapainya+penerimaan+pajak+bumi+dan+bangunan,diakses tanggal 28 Septmber 2015 pukul 16.45 WIB)

Hasil penelitian Witiya Tri Handayani di atas digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini, dimana ada beberapa persamaan materi yang dibahas pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Mengingat selalu adanya WP yang menunggak atau terlambat dalam membayar PBB maka Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola PBB tersebut dianggap perlu untuk mencari solusi. Berdasarkan permasalahan yang ada, untuk dapat mencari solusi maka sebelumnya harus mencari dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar kewajibannya dalam hal ini PBB di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2015 untuk selanjutnya dapat dicari solusi atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya adalah minimnya sosialisasi secara bertahap yang dilakukan kepada masyarakat dan minimnya pendataan ulang yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung lebih serius lagi dalam menangani hal ini mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Daerah yang berkompeten untuk di tingkatkan. Pada penelitian ini dilakukan pembatasan

pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Bandar Lampung yang belum mencapai target penerimaan PBB yaitu Kecamatan Langkapura, Kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari 3 kecamatan/kelurahan yang dipilih memiliki jumlah WP yang menunggak cukup banyak, peneliti memilih 1 (satu) kelurahan dengan jumlah tunggakan WP yang tertinggi yaitu: Kecamatan Tanjung Karang Timur Kelurahan Kota Baru dengan jumlah WP yang menunggak sebanyak 5,569, Kecamatan Langkapura Kelurahan Gunung Terang dengan Jumlah WP yang menunggak sebanyak 6,207, dan Kecamatan Kedamaian Kelurahan Bumi Kedamaian dengan jumlah WP yang menunggak sebanyak 5,817.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul:**"Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan adminitrasi pemerintah yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai input bagi pemerintah daerah serta yang terlibat langsung dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga Negara kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Nasional. Pengertian pajak menurut Atep Adya Barata (2004:17) merumuskan:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum".

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani dalam Rahman (2010:15) merumuskan:

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan".

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat dua fungsi pajak, (Mardiasmo 2011:1)yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* atau penerimaan (*Revenue yielder*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi Pemerintah yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

b. Fungsi Reguler atau mengatur (*Economic tool*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah agar jumlahnya dapat ditekan.

3. Jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam (Mardiasmo, 2011: 2) yaitu:

1) Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

   (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor.

(b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor.

2) Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN dan. BM, PBB.

3) Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Daerah tingkat 2: Pajak Hotel, Pajak Restorant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

4. Tarif Pajak

Secara garis besar, perpajakan mengenal 4 (empat) tarif, yaitu:

a. Tarif progresif adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi pula persentasenya, sehinnga menghasilkan jumlah beban yang jauh lebih tinggi.
b. Tarif degresif adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaanya, semakin rendah persentase tarifnya.
c. Tarif proporsional disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang.
d. Tarif tetap adalah tarif yang dalam jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Tarif PBB termasuk dalam tarif pajak proporsional disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan dimana tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang.

5. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemak muran rakyat”.

Menurut Erly Suandy (2013: 262)

"Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah."

Berdasarkan pengertian pajak daerah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pridadi atau badan yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah serta untuk memakmurkan rakyat.

6. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak iuran yang dibayarkan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang- Undang No.28 tahun 2009 pajak daerah digolongkan dalam dua golongan terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

   Pajak Provinsi terdiri dari lima macam pajak, yaitu: (a)Pajak Kendaraan Bermotor; (b)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan;dan (e)Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

   Pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari 11 macam, yaitu: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan;(f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet;(j) PBB Perdesaan dan Perkotaan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2010:218) PBB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 PBB merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berdasarkan pengertian PBB di atas maka dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dengan pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Kabupaten atau Kota, serta bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan wilayah Kabupaten atau Kota.

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2), di bagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dana bagi hasil dari pemerintah pusat pajak bumi dan bangunan sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.

b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan kerekening kas umum daerah kabupaten/kota.
c. 9% untuk biaya pemungutan. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 10% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan/ kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran berjalan
d. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan/ kota.
e. 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

C. Hak dan Kewajiban Fiskus

Menurut Waluyo (2010:218) fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Serta memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada WP sehingga WP mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpaajakan yang berlaku.

Dapat dikatakan tentang hak dan kewajiban fiskus dalam hal pelayanan terhadap WP secara umum dapat dirinci didalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti berikut:

a) Berhak meminta keterangan atau data pendukung dalam memberikan informasi Perpajakan dan meminta kelengkapan yang dipersyaratkan,
b) Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap WP. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP.
c) Fiskus berhak menerbitkan suatu-surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan Pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
d) Fiskus dapat melakukan tindakan penagihan yang dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa.
e) Fiskus berhak melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.
f) Memberikan formulir perpajakan yang diperlukan WP saat itu juga.
g) Menerbitkan surat keputusan atas permohonan WP.

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang hak dan kewajiban fiskus dalam bidang PBB dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

a) Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan informasi perpajakan khususnya PBB, serta wajib memberikan kepada WP berupa informasi yang dibutuh kan WP baik secara lisan maupun tertulis.
b) Dalam hal pelayanan pendaftaran Obyek Pajak baru berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban memberikan pelayanan pendaftaran Obyek Pajak Baru dan memberikan SPPT.

c) Dalam pelayanan mutasi obyek atau subyek PBB berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib memberikan dan memproses pelayanan permohonan mutasi memberikan SPPT.

d) Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT.

e) Dalam hal pelayanan permohonan keberatan PBB, banding, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib menerimanya serta memberikan jawaban atas permohonan tersebut di atas (Machfud Sidik, 1999: 96-103).

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban:

1. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya.
2. Menandatangani sendiri SPT itu.
3. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

WP harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap WP yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik WP.

WP mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada keselahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang di anggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi) meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan/ pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada WP.

E. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Oficial Assesment System*

   Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini WP bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem diterapkan dalam hal pelunasan PBB, dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan Pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun.

2. *Self Assesment System*

   Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP terletak pada pihak WP yang bersangkutan. Dalam sistem ini WP bersifat aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi.

3. *With Holding System*

   Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah Pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan WP dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Sebagai bukti pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Dalam penjelasan 3 sistem pemungutan pajak di atas, pemungutan PBB termasuk kedalam sistem *Official Assesment System*, karena WP tidak perlu menghitung sendiri. Tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT).

F. SPOP dan SPPT

1. SPOP yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data Objek Pajak.

   Cara mendapatkan SPOP

   a. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama), KP PBB, KP2KP, KP4, atau tempat lain yang ditunjuk.

b. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP.
c. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP.
d. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila ada kesalahan dalam pengisian
e. Menunjuk pihak lain selain pegawai Direktorat Jendral Pajak dengan surat kuasa khusus bermaterai, sebagai kuasa WP untuk mengisi dan menandatngani SPOP.
f. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu yang dilampaui dengan menyebutkan alasan yang sah.

2. SPPT yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

   Cara mendapatkan SPPT

   1. Mengambil sendiri dikantor kelurahan/kepala desa atau di KPP Pratama/KPPBB tempat Objek Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk.
   2. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor POS dan giro atau diantarkan oleh aparat kelurahan atau desa.
   3. WP dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak (500200) yang merupakan layanan pulsa lokal dari *Fixed Phone*.

G. Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2010:218) tarif Pajak yang dikenakan atas objek Pajak adalah sebesar maksimal 0,5%. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual Objek Pajak. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Perda Nomor 2 tahun 2011 Pasal 7 menetapkan tarif PBB sebagai berikut:

a) 40% dari NJOP untuk PBB sektor Perdesaan dan perkotaan yang NJOP-nya ≥ Rp. 1 miliar;
b) 20% dari NJOP untuk PBB sektor Perdesaan dan perkotaan yang NJOP-nya < Rp. 1 miliar.

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000 untuk setiap WP. Besaran pokok PBB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan yaitu NJOP setelah dikurangi NJOPTKP atau dengan rumus sebagai berikut: Pajak Terutang = Tarif x (NJOP–NJOPTKP)

H. Cara Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Peningkatkan penerimaan PBB dapat diukur melalui model manajemen strategi yang dikemukakan oleh Hungerdan Wheelen (2003:9) yaitu:

a. Pengamatan lingkungan, yaitu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya.
b. Perumusan strategi yaitu tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh organisasi.
c. Implementasi strategi yaitu tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan.

d. Evaluasi dan pengendalian yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh.

I. Kerangka Pikir

Keberhasilan suatu bangsa yaitu tercipta dalam tujuan pembangunan Nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Pajak yang dimaksud disini PBB, PBB dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Dalam PBB wilayah kerja yang merupakan sumber penerimaan pajak paling besar di Kota Bandar Lampung yaitu dari dua aspek sektor wilayah yang menjadi lahan target penarikan pajak yaitu sektor pedesaan dan sektor perkotaan saja, karena secara geografis, wilayah kerja di Kota Bandar Lampung ini didominasi oleh tanah-tanah perdesaan serta rumah-rumah penduduk baik diperdesaan atau pun diperkotaan.

Dalam PBB perlu didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus dan para WP itu sendiri. Kedua pihak di atas sangat berperan dalam pemungutan pajak untuk menjalankan fungsinya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Dimana dalam

menjalankan hak dan kewajiban diharapkan baik fiskus maupun WP harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan PBB yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB. Salah satu peran dari fiskus yaitu dalam hal pelaksanaan pemungutan PBB sedangkan WP berperan penting yaitu melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Hak dan kewajiban masing-masing kedua pihak tersebut dilakukan guna untuk memenuhi tertib administrasi dan untuk mencapai suatu kinerja yang positif demi tercapainya tujuan pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yang potensial.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggambarkannya pada kerangka pikir berikut:

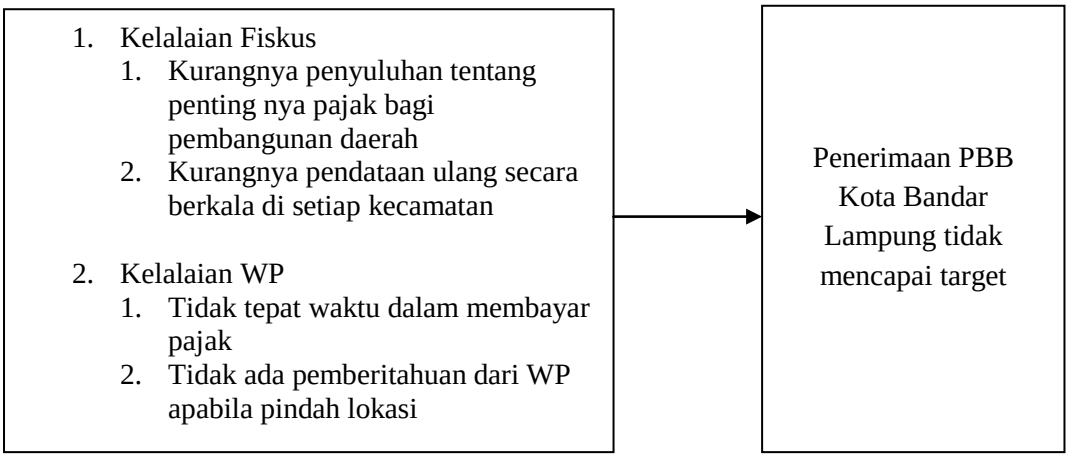

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu Nazir (2008: 63).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung, sehingga tergolong pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, hal ini dikarenakan tidak semua data kecamatan yang ada di Bandar Lampung dapat digunakan seluruhnya, namun data yang sesuai dengan tujuan peneliitan saja yanga digunakan.

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan/lisan dari orang lain/perilaku yang dapat

diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut (Bogdan dan Taylor, 2009:58).

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000:7). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2008:218) *perposive sampling* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman pariasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Penentuan sampel pada penelitian kulitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

C. Subjek Penelitian

Subyek peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Fiskus

   Fiskus adalah aparatur yang menjalankan operasinal pembayaran, pendataan, atau sebagai fasilitator yang memahami bagaimana proses penerimaan dan pemungutan PBB yaitu fiskus pengawasan, pendapatan lain-lain dan bidang perimbangan keuangan.

2. Pihak Kecamatan Yang Dijadikan Sampel

   Pihak kecamatan adalah perpanjangan tangan dari pihak fiskus, untuk membantu pihak fiskus melakukan penagihan terhadap WP.

3. Wajib Pajak

   WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut kententuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, hal ini yang menjadi informan adalah WP yang menunggak.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kecamatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kriteria tersebut digunakan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung tahun 2013-2015 ditunjukan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan di Bandar Lampung yang Menjadi Sampel Penelitian.

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah WP	WP yang menunggak	Sisa Target (%) per Kecamatan
Tanjung Karang Timur			
Kota Baru	7.226	5.569	
Tanjung Agung	2.404	1.968	69,37%
Kebon Jeruk	3.082	2.437	
Sawah Lama	1.725	1.204	
Sawah Brebes	2.498	1.714	
Langkapura			
Langkapura	4.396	3.371	
Langkapura Baru	3.357	2.384	79,82%
Gunung Terang	7.923	6.207	
Gunung Agung	4.295	3.418	
Bilabong Jaya	2.444	1.948	
Kedamaian			
Kedamaian	5.641	4.272	
Bumi Kedamaian	7.440	5.817	
Tanjung Agung Raya	926	738	76,80%
Tanjung Baru	4.548	3.372	
Kalibalau Kencana	5.265	3.685	
Tanjung Raya	4.391	3.755	
Tanjung Gading	2.459	1.798	

Sumber:Dinas Pendapatan Daerah, di olah 2015

Pemilihan ketiga kecamatan diatas, berdasarkan pada jumlah WP yang paling banyak menunggak PBB di Kota Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Manajemen sumber daya fiskus PBB
   a. Kurangnya penyuluhan kepada WP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah
   b. Kurangnya pendataan ulang secara berkala di setiap kecamatan
2. Kepatuhan Wajib Pajak PBB
   a. Tidak tepat waktu dalam membayar pajak

b. Tidak ada pemberitahuan dari WP apabila pindah lokasi

E. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober 2015, penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung. Pemilihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian dikarenakan data-data yang berhubungan PBB di Kota Bandar Lampung merupakan tanggung jawab dan tersedia pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung.

F. Jenis data

Jenis data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti jenis data tertulis (Loftland dan Loftland, 2004:47).

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer data yang berasal dari hasil wawancara, jenis data dapat ditulis atau direkam. Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive sampling* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan diambil oleh peneliti (Nazir, 2008: 63).

Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang PBB di Kota Bandar Lampung, yang difokuskan 3 (tiga) kecamatan di Kota Bandar Lampung yang belum mencapai target penerimaan PBB yaitu Kecamatan Langkapura, Kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang akan mendukung kelengkapan data tentang PBB di Kota Bandar Lampung (Nazir, 2008: 63).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara secara terbuka, yaitu dimana peneliti tidak menggunakan *guidance* tertentu dalam melakukan wawancara. Jenis ini sering disebut dengan metode tidak terstruktur. Peneliti menanyakan topik awal pada responden, lalu menggali secara mendalam informasi yang ada pada responden tanpa terlalu terikat dengan topik penelitian. Metode ini sering digunakan untuk menentukan judul penelitian, atau pada penelitian kualitatif, di mana peneliti merupakan bagian dari penelitian itu sendiri. Dibutuhkan *skill* yang tinggi untuk melaksanakan wawancara tidak terstruktur (Nazir, 2008: 63).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terbuka dengan jalan mewawancarai sumber-jenis data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi, wawancara dilakukan dengan:

a. Fiskus
   1) Atjep Amri Wahyudi, SE, Ak.MM selaku Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Bandar Lampung.
   2) Netty Martianne selaku Seksi Pendapatan dan lain-lain Dinas Pendapatan Daerah Bandar Lampung
   3) Achmad Mardiansyah, SE selaku Seksi Pengawasan dan Pengendalian PAD Dinas Pendapatan Daerah Bandar Lampung
   4) Ito Saibatin, SE selaku Kepala Bidang Perimbangan Keuangan.
b. Kecamatan
   1) Drs. Hi. Erjuli Usman, SE. MM selaku Camat Langkapura
   2) Antoni Irawan, STP, MM selaku Camat Kedamaian
   3) Drs.Rahmad Indra Putra selaku Camat Tanjung Karang Timur
c. Wajib Pajak.

   WP pada penelitian ini sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti seperti WP yang menunggak atau belum membayar PBB, berdomiisili di Kecamatan Langkapura, Tanjung Karang Timur dan Kedamaian.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa data PBB di Kota Bandar Lampung.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah:

1. ***Editing***

   Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami (Moleong, 2008: 38).

2. **Interpretasi**

   Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2008: 38).

   Interpretasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung yang dikembangkan oleh peneliti.

I. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian (Moleong, 2008: 38).

Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterprestasikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:93).

Terdapat tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat

ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan (Milles dan Huberman, 1992:16).

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya (Milles dan Huberman, 1992:16).

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan,

pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti (Milles dan Huberman, 1992:16).

Penulis melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

J. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat seiring sejalan dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afifuddin, 2012: 159).

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas yang maksudnya adalah:

1. Validitas internal (Kredibilitas)

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa

yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas.

Validitas internal (kredibilitas) dapat dilakukan dengan: a). Memperpanjang masa observasi, b). Melakukan pengamatan terus menerus, c). Trianggulasi data, d). Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), e). Menganalisis kasus negatif, f). Menggunakan bahan referensi, dan g). Mengadakan *member check* (Nasution, 2006:114).

Pada penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memperpanjang masa observasi, memperpanjang masa observasi dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, *key* informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti.
b. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara

terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan.

c. Trianggulasi data, tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

d. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.

e. Menganalisis kasus negatif, menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu jenis data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.

f. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.

g. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member check* dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh informan. Tujuan ini dilakukan adalah agar informan dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Member check* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan (Nasution, 2006:114).

2. Validitas Eksternal (Transferabilitas)

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisir, karena dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan sampling acak, atau senantiasa bersifat *purposive sampling* (Nasution, 2006:114).

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan tekhnik ulang atau *check recheck* (Nasution, 2006:114).

4. Objektivitas

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau di *confirm* oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah *confirmability* (Nasution, 2006:114).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Gambaran Umum

Kota Bandar Lampung merupakan ibu Kota Provinsi Lampung Indonesia. Kota ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 879.651 jiwa (sensus 2012) kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 3,79 % per tahun. Secara geografis, ibu Kota Provinsi Lampung ini berada dipintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut DKI Jakarta.

Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandar Lampung cenderung padat, sehingga sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia bagian barat, Bandar Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 20 Kecamatan dengan 126 Kelurahan,yaitu:

1. Kecamatan Kedaton
2. Kecamatan Sukarame
3. Kecamatan Tanjung Karang Barat
4. Kecamatan Panjang
5. Kecamatan Tanjung Karang Timur
6. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7. Kecataman Teluk Betung Selatan
8. Kecamatan Teluk Betung Barat
9. Kecamatan Teluk Betung Utara
10. Kecamatan Rajabasa
11. Kecamatan Tanjung Seneng
12. Kecamatan Sukabumi
13. Kecamatan Kemiling
14. Kecamatan Labuhan Ratu
15. Kecamatan Way Halim
16. Kecamatan Langkapura
17. Kecamatan Enggal
18. Kecamatan Kedamaian
19. Kecamatan Teluk Betung Timur
20. Kecamatan Bumi Waras

Luas wilayah Kota Bandar Lampung mencapai 192,96 Km^2. Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 9 Kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan.

Letak yangs trategis menjadikan daerah ini sebagai Daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Jawa. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan 5020’ sampai dengan 5030’ lintang selatan dan 105028’ sampai dengan 105037’ bujur timur. Letak tersebut berada di Teluk Lampung dan diujung selatan pulau Sumatera, yang memiliki luas wilayah 192,18 Km^2 terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kota Madya Lampung Selatan
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Ketibung Kota madya Lampung Selatan serta Teluk Lampung
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kota Madya Lampung Selatan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kota madya Lampung Selatan.

2. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kota Bandar Lampung sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah masyarakat yang agamis. Mereka taat dalam menjalankan

ajaran agama yang dianutnya sebagian besar memeluk agama Islam, memegang teguh adat istiadat leluhur, terbuka pada perubahan dan pembaharuan serta tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi yang dominan berkembang di Kota Bandar Lampung adalah budaya gotong royong meskipun ada proses akulturasi dengan tradisi Lampung, Padang, Jawa dan lain sebagainya. Sebagaian besar penduduk Kota Bandar Lampung berasal dari suku Lampung disamping suku-suku lainnya seperti Padang, Jawa dan lain-lain. Dalam perkembangannya budaya yang berkembang di Kota Bandar Lampung juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

3. Kondisi Perekonomian

Kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Bandar Lampung yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (29,82%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,78%), sektor jasa-jasa (14%), sektor pengangkutan dan komunikasi (13,23%). Sedangkan sektor lainnya (20,17%) meliputi sektor pertambangan, pertanian, bangunan listrik, dan gas rata-rata 3-4%. Dari sisi penerimaan APBD Kota Bandar Lampung pada tahun 2009, penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan merupakan yang terbesar yaitu sekitar 87% atau sekitar 181,1 milyar dari sekitar 206,9 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 9% atau sekitar 19,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain yaitu sebesar 6,3 milyar yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Dari sisi pengeluaran anggaran terbesar, diperuntukkan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 80% atau sekitar 163,6 milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 43,3 milyar atau sekitar 20%.

Alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut: Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat *costrecovery*. Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada,selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah.

4. Kondisi Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonom menurut asas desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selaku lembaga legiaslatif, sesuai dengan proporsi jumlah penduduk maka anggota DPRD Kota Bandar Lampung berjumlah 85 orang. Sedangkan lembaga eksekutif di Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Daerah/ WaliKota. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten, 10 Bagian, 33 sub bagian, 17 dinas, 6 badan, 3 kantor, 1 UPTD.

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 126 (seratus dua puluh enam) kelurahan, dan sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung merupakan pusat dari semua kegiatan, baik dibidang Pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan maupun perekonomian yang secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk mandiri dalam segala hal dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Tidak terkecuali pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendapatan dan keuangan. Untuk itu perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah. Demikian halnya dengan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu Daerah Otonom yang juga dilengkapi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bertempat di komplek perkantoran Pemerintah Kota Bandar Lampung Jl. Dr.Susilo Nomor 2 (Gedung Pepadun) Teluk betung Utara Bandar Lampung.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan daerah asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi dari Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah:

1) Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran dinas.
2) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di bidang Pendapatan Daerah.

3) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah.
4) Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan PBB.
5) Pengoordinasian dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi.
6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
7) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung yakni "Terwujudnya Penerimaan Daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang Aman, Sejahtera, Maju dan Modern".

Misi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1) Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

3) Meningkatkan kemampuan SDM atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
4) Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
5) Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan target penerimaan yang sesuai dengan potensi sesungguhnya.
6) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat (WP) kepada Pemerintah.
7) Menambah dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung maka struktur Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administrasi Kepala satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Adapun fungsi Sekretaris adalah:

1) Pelaksanaan urusan perencanaan dan program
2) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum
3) Pelaksanaan urusan keuangan dan asset
4) Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa Sub Bagian seperti Sub Bagian Sunprog Monitoring dan Evaluasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Selain itu,ada juga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, meginventarisir dan mengkaji potensi sumber-sumber pendapatan Daerah serta menyusun kebijakan operasional pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan lain-lain dan dana

perimbangan, serta evaluasi dan pelaporan daerah. Fungsi Bidang Pendapatan adalah:

1) Menetapkan kebijakan pegelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
2) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
3) Mengkoordinasikan tentang penerimaan daerah dengan instansi terkait
4) Memberikan bimbingan dan pertimbangnan teknis terhadap kegiatan pendataan, perhitungan,penetapan, penagihan pajak dan retribusi
5) Melaksanakan pendaftaran WP dan wajib retribusi
6) Menetapkan pajak dan retribusi daerah
7) Melaksanakan penagihan pada seluruh komponen pendapatan daerah
8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pendapatan.

Bidang pendapatan membawahi tiga seksi yakni seksi pajak daerah dan retribusi daerah, seksi dana perimbangan lain-lain dan seksi penerimaan dan sumber lain-lain.

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkaji data serta dasar-dasar dalam rangka penyusunan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, pengawasan asset yang meliputi ventarisasi, penghapusan, penyimpanan dan pengamanan serta pengawasan dan penertiban. Adapun fungsi bidang perencanaan dan pengendalian operasion adalah:

1) Mengumpulkan data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD
2) Mengkaji data dalam perencanaan anggaran
3) Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran
4) Menyiapkan pengesahan dokumen anggaran.
5) Menetapkan kebijakan pengelolan asset daerah kabupaten
6) Melaksanakan pengelolaan asset daerah kabupaten
7) Melaksanakan pengawasan asset daerah kabupaten
8) Memfasilitasi pengelolaan asset daerah pemekaran skala kabupaten

Bidang perencanaan dan pengendalian operasional membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan dan ekstensifikasi, seksi pengendalian dan pengawasan dan seksi pengolahan data dan informasi.

e. Bidang Pembukuandan Pelaporan

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinir, melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis operasional serta pengawasan atas pinata usahaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan APBD. Adapun fungsi bidang pembukuan dan pelaporan yaitu:

1) Menyusun draft SK tim kerja penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah baik laporan semesteran maupun laporan tahunan
2) Menyusun laporan semesteran pelaksanaan APBD
3) Menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (laporan tahunan) yang terdiri dari: rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, rancangan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

4) Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal pelaporan keuangan, pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pembukuan dan pelaporan membawahi tiga seksi yakni seksi pembukuan SKPD/RD, seksi pelaporan penerimaan dan seksi pembukuan penerimaan.

f. Pendaftaran dan Penetapan

Bidang pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan operasional, penyelenggaraan keuangan bidang pendaftaran dan penetapan pada pendapatan keuangan daerah. Adapun fungsi bidang pendaftaran dan penetapan adalah:

1) Menyiapkan anggaran kas
2) Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
3) Menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
4) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
5) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk
6) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
7) Menyimpan uang APBD

8) Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan inventaris daerah
9) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna angaran atas beban rekening kas umum
10) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah
11) Melakukan penagihan piutang.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Dispenda dalam penyelenggaraan tugas teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sepanjang teknis pelaksanaannya.

C. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Karang

Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Lampung berdiri pada tahun 1963 dengan status dinas luar tingkat 1 Teluk Betung sedangkan kantor inspeksi keuangan berkedudukan di Palembang jadi kantor dinas luar tingkat 1 Teluk Betung merupakan Kantor yang ada di bawah kantor inspeksi keuangan Palembang. kantor dinas luar tingkat 1 Teluk Betung tahun 1964 ditingkatkan status menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung karena karisidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung. Di samping ekonominya sudah meningkat untuk hadirnya sebuah kantor dalam mengelola penerimaan pajak. Kantor inspeksi keuangan Teluk Betung dengan adanya reorganisasi

Direktorat Jendral Pajak diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung Pada tahun 1969. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/1989 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung tepatnya pada tanggal 1 April 1989 dan pada tanggal 4 Setember 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-159/PJ/2008 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang saat ini memiliki 104 Pegawai Pajak dengan Kepala Kantor Ponti Kurniawan Mawardi, S.Kom., M.B.A.

2. **Azas dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Karang**

   Azas dan tujuan Kantor Pelayanan Pajak terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

3. **Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang**

   Kepala Kantor: Ponti Kurniawan Mawardi, S.Kom., M.B.A.

   Sub. Bagian Umum. (3 Pegawai)

   Kepala Sub. Bagian Umum: Drs, Fahrurrozi, Ak., M.M.

   Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara penerimaan penyampaian dokumen di KPP.
b. Tata cara pengajuan usul permohonan berhenti kerja sebagai PNS atas permintaan sendiri.
c. Tata cara pengurusan gaji, pengajuan uang makan PNS dan uang duka wafat/tewas.
d. Tata cara permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
e. Tata cara pembuatan dan pengumuman rencana pengadaan barang / jasa..
f. Tata cara pelaksanaan pembayaran tagihan dengan mekanisme pembayaran melalui uang persediaan di KPP.
g. Tata cara pembuatan Laporan tahunan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV (42 Pegawai)

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (8 Pegawai): Drs, Muhammad Faisal

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (12 Pegawai): Endartana Dwi Nugroho, S.E., M.T.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (11 Pegawai): Suhono, S.E., Ak., M.M.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (11 Pegawai): Erwin Junaidi, S.E., M.M.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
b. Tata cara penyelesaian permohonan keberatan PPH, PPN dan PPnBM di KPP.

c. Tata cara penyelesaian permohonan pembetulan PPH, PPN dan PPnBM di KPP.
d. Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PPH, PPN dan PPnBM di KPP.
e. Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan dan pembatalana ketetapan pajak yang tidak benar PPH, PPN dan PPnBM di KPP.
f. Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) di seksi pengawasan dan konsultasi.
g. Tata cara pembuatan SPMKP atau SPMIB yang hilang.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (6 Pegawai)

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi: Atjep Amri Wahyudi, S.E., Ak., M.M.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
b. Tata cara pembuatan dan penyampaian Surat perhitungan (SPH) kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
c. Tata cara perubahan data tagihan pada tempat pembayaran tertentu akibat surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB yang ditandatangani oleh kepala Kanwil DJP.
d. Tata cara pembenahan data Master file WP dan atau pengusaha kena pajak.
e. Tata cara Inventaris dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan catatan penerapan tata kelola TIK di KPP.

f. Tata cara pemberian akses pihak ketiga di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
g. Tata cara standardisasi penulisan nama dan alamat WP pada table khusus hasil standardisasi penulisan nama dan alamat WP di Kantor Pelayanan.

Seksi Ekstensifikasi (9 Pegawai)

Kepala Seksi Ekstensifikasi **:** Boss Achmad, S.Si., M.T.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
b. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP dan atau PKP.
c. Tata cara penerbitan daftar normatif untuk usulan SP3 Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Ekstensifikasi.
d. Tata cara penelitian Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Ha katas tanah dan atau bangunan bagi KPP Pratama.
e. Tata cara penyampaian usual pemutakhiran kode wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota di KPP Pratama.
f. Tata cara pelaksanaan penggalian potensi WP orang pribadi baru.
g. Tata cara penerbitan usulan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP.

Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan (13 Pegawai): Edi Syahputr

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara pendaftaran Nomor Pokok WP.
b. Tata cara penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan Pph dan SPT Masa.

c. Tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi dan pelayanan terhadap WP orang pribadi baru oleh seksi pelayanan di KPP selain KPP Pratama.
d. Tata cara penyampaian Laporan bulanan pengawasan penyampaian surat himbauan kepada WP orang pribadi baru selain hasil kegiatan ekstensifikasi oleh kantor pelayanan pajak ke kanwil DJP.
e. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal WP melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A UU KUP di KPP.
f. Tata cara pembentukan tim sensus pajak nasional di KPP Pratama.
g. Tata cara penyelesaian permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (3 Pegawai)

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal: Hotman E. Siregar, S.E., Ak., M.H.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan lebih bayar.
b. Tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain WP patuh.
c. Tata cara penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan bukti permulaan.
d. Tata cara pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.
e. Tata cara penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan (nothit).
f. Tata cara pengiriman konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk di review.

g. Tata cara pembuatan daftar usul penetapan angka kredit (dupak) pada Kantor Pelayanan Pajak.

Fungsional Pemeriksa (13 Pegawai)

Bertugas Melakukan Pemeriksaan

Seksi Penagihan (6 Pegawai)

Kepala Seksi Penagihan: Priambudi Pelita Handoko, S.T., M.T.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tata cara penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) besert bukti pembayarannya.
b. Tata Cara Penyitaan Terhadap Kekayaan PenanggungPajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka,tabungan, saldo rekening Koran, giro, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.
c. Tata cara penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak berupa piutang dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
d. Tata cara menjawab konfirmasi data tunggakan WP.
e. Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bunga penagihan, penerbitan dan penyampaian Surat teguran Penagihan ,Penerbitan dan Pemberitahuan Surat paksa, penerbitan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan Pencabutan Sita.
f. Tata cara Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak berupa barang tidak bergerak dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

g. Tata cara penyampaian Surat Paksa di Luar Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang menerbitkan surat paksa (yang meminta bantuan).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Bandar Lampung

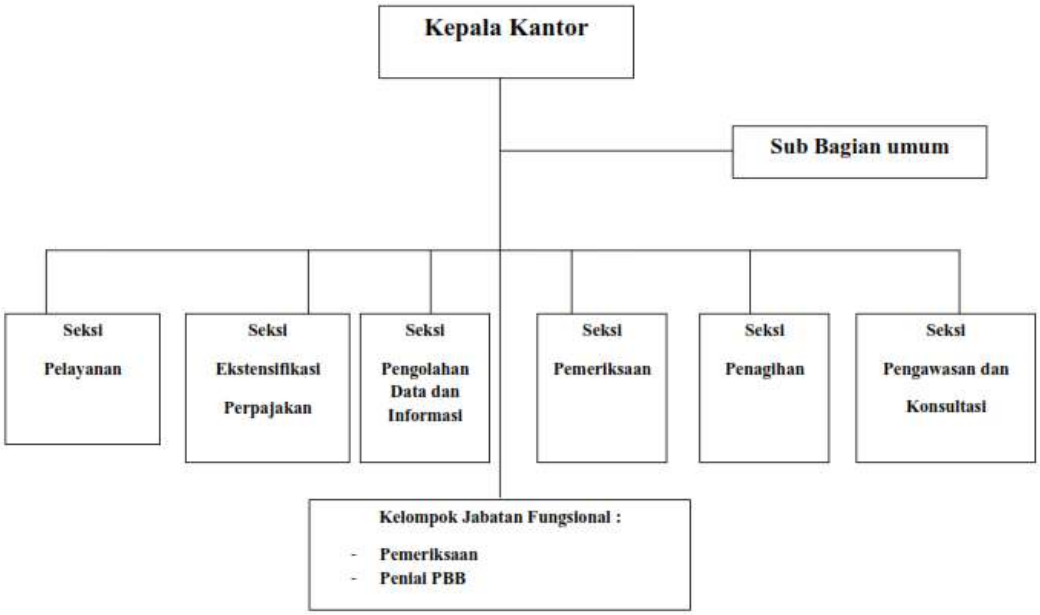

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung adalah karena manajemen sumber daya fiskus PBB yang belum baik, yaitu:

1. Kurangnya penyuluhan terhadap WP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah untuk menunjang fasilitas umum yang ada di Kota Bandar Lampung.
2. Kurangnya pendataan ulang secara berkala di setiap kecamatan.

Serta adanya ketidakpatuhan WP PBB dalam memenuhi kewajibanya. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh WP termasuk dalam kategori perlawanan aktif dan pasif, yaitu:

1. Tidak tepat waktu dalam membayar PBB atau melalaikanya.
2. Tidak ada pelaporan terhadap fiskus apabila pindah lokasi.
3. Tingkat intelektual WP yang rendah tentang PBB serta hak dan kewajiban sebagai WP.

Faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung adalah adanya komitmen sumber daya manusia yang baik, kondisi sosial masyarakat yang mendukung salah satunya implementasi

peraturan mengenai perubahan PBB dari dana perimbangan menjadi pajak daerah. Serta seharusnya masyarakat mempunyai tingkat intelektual dan kesadaran tinggi dapat mendukung peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung.

Proses perencanaan strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bandar Lampung telah menggunakan langkah-langkah berdasarkan analisis visi misi mandat organisasi, sehingga dirumuskan strategi dan kebijakan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB. Akan tetapi proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bandar Lampung ini belum memperhatikan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal Kota Bandar Lampung.

1. Faktor Eksternal
    a. Mekanisme pembayaran yang (mungkin) rumit
    b. Fasilitas penujang PBB belum optimal dan belum dipahami oleh WP
2. Faktor Internal
    a. Tidak ada sosialisasi dan pendataan secara berkala di karenakan belum adanya anggaran untuk mejalankan rencana kerja tersebut.

Berdasarkan faktor tersebut Dispenda Kota Bandar Lampung membuat suatu strategi, dimana pembuatan kolektor/pemungut pajak disetiap kecamatan masing-masing yang dipegang oleh tenaga sukarelawan. Dengan adanya pemungut pajak diharapkan dapat mempermuah pembayaran PBB dengan penagihan *door to door* hal ini dikarenakan tinggkat intelektual dan kesadaran masyarakat rendah untuk membayar PBB maka di bentuk kolektor/pemungut pajak untuk mengoptimalkan hasil penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain di bagi menjadi dua untuk Fiskus dan WP , yaitu:

1. Saran bagi Fiskus
   a. Dalam proses perumusan strategi, Dispenda Kota Bandar Lampung perlu melakukannya dengan tahap-tahap perencanaan strategis seperti teori perencanaan srategis yang dikemukakan oleh para pakar manajemen strategis untuk organisasi Pemerintah agar strategi yang disusun dapat sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Bandar Lampung. Perlu adanya tindakan dan upaya yang terkait dengan penerapan sanksi hukum yang tegas baik sanksi hukum maupun sanksi administratif bagi WP yang tidak mematuhi kewajibannya terutama dengan pemberdayaan fiskus secara optimal untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu perlu adanya perumusan strategi baru dalam penarikan pajak pada WP yang selama ini menggunakan sistem *self assessment* yang dirasakan masih kurang efektif, karena dalam sistem ini WP dituntut untuk berperan aktif dalam pembayaran PBB tetapi pada kenyataan WP berperan pasif dalam pembayaran PBB.
   b. Perlu dilakukan peningkatan intelektual pada masyarakat selaku WP untuk memenuhi kewajibannya membayar PBB secara rutin dengan merencanakan sosialisasi di setiap kecamatan untuk meningkatkan intelektual dan pemahaman masyarakat tentang PBB. Serta adanya kebijakan dari Dispenda Kota Bandar Lampung kepada WP yang belum membayar pajak untuk mengangsur pembayaran pajak, sehingga WP tidak

terbebani dengan hutang pajak yang harus dibayarkan dan realisasi penerimaan PBB dapat tercapai.

2. Saran bagi Wajib Pajak
   a. Bagi WP diharapkan memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB secara tepat waktu, karena dengan adanya pembayaran PBB secara tepat waktu pembangunan di Kota Bandar Lampung lebih lancar, fasilitas umum dapat lebih menujang untuk kenyamanan masyarakat Bandar Lampung terutama, dan realisasi penerimaan PBB dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
   b. WP seharusnya memberikan informasi kepada fiskus jika mereka berpindah lokasi atau memiliki Objek Pajak baru karena dengan adanya laporan maka target pajak khususnya di suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat hasil PBB nya. Pemahaman WP pun perlu ditingkatkan bahwa pendataan sangat penting untuk meningkatkan dan meberikan informasi bagi pendataan ke tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azis,2007. *Pendapatan Asli Daerah*, Erlangga, Jakarta

Barata,Atep Adya 2004,*Pendapatan Asli Daerah.* Erlangga, Jakarta

Bastian, 2008, *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Bogdan dan Taylor, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Graha Ilmu, Jogjakarta

Brata.2004.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonom*i, Erlangga, Jakarta

Davey, 2008, *Perpajakan Daerah*. Rajawali. Jakarta.

Elita , 2007.*Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, Rajawali. Jakarta.

Faulkner, 2007, *Strategi Kompetitif.* ANDI, Yogyakarta

Kamus Bahasa Indonesia, 2005, Balai Pustaka, Jakarta

Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran: Edisi 1.2, Jilid-2*. PT. Indeks, Jakarta

Kuncoro,2008, *Otonomi Daerah*. Fokusmedia, Jakarta

Loftland dan Loftland, 2004, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.

Lupiyoadi, 2009,*Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 2*.Salemba Empat, Jakarta

Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakara, Bandung.

Mardiasmo, 2008.*Optimalisasi Belanja Modal*.Erlangga, Jakarta.

Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta

Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta

Pratiwi, 2007, *Proporsi Pendapatan Asli Daerah*, Rajawali, Jakarta.

Purwanto dan Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnisitrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosia*l,Gaya Media Jogyakarta

Rochmat,Soemitro,2008, *Pajak Daerah*.Erlangga, Jakarta.

Sukirno, 2008.*Pertumbuhan Ekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Suparmoko, 2007, *Pengeluaran Pemerintah*. Erlangga Jakarta.

Supriatna Tjahya, 2006, *Perusahaan Daerah*. Rajawali, Jakarta.

Sutrisno, 2004, *Konsep Pendapatan Asli Daerah*, Rajawali, Jakarta.

Tambunan,2006.*Pertumbuhan Ekonomi*. Rajawali, Jakarta.

Todaro, 2007.*Pertumbuhan ekonomi*. Rajawali, Jakarta.

Uppal, 2006.*Keuangan Pusat dan Daerah*.Erlangga, Jakarta

Widjaja,2008. *Pendapatan Asli Daerah*. FEUI, Jakarta.

Wong,2006.*Pembangunan Infrastruktur*. Citra Media, Bandung

B. Sumber Lain

Afrilyanita (2009) tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yangberasal dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Probolinggo padaEra Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, 2014, *Kota Bandar Lampung dalam Angka*, Bandar Lampung.

Datu K,Indra Rindu 2012 *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009*, Skripsi.

Dwi Gatot,Adiatmojo 2010, *Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin*,Jakarta.

Kuncoro,Daru Kuncoro, 2010. *Analisis Kemampuan PAD Kabupaten/Kota di* Provinsi *Jawa Tengah*, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, Tidak diterbitkan

SyaharuddinH,MappaNasrundanAlwi, 2012, *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, Skripsi.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, *Undang-undang Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Jakarta.

Wahidi, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur"*Kal-Tim

C. *Website*

http://bandarlampungku.com/artikel.capaian-target-pad-2014-bandarlampung-masih-rendah, diunduh tanggal 21 Mei 2015

http://www.lampungonline.com/2015/01/realisasi-pad-bandar-lampung-terganjal.html , diunduh tanggal 21 Mei 2015